

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir, sektor pariwisata adalah sektor yang sering dibahas dalam studi pembangunan ekonomi, karena sektor pariwisata menjadi bagian utama dalam peningkatan ekonomi daerah atau negara. dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu aktor dalam keberhasilan pembangunan nasional di sektor pariwisata. Semua sektor yang ada di kelembagaan merupakan naungan dari pemerintah, oleh karena itu pemerintah berperan dalam meningkatkan pembangunan dan perkonomian, termaksud dalam meningkatkan sektor pariwisata di seluruh daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18 Ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berkaitan dengan daerah untuk bertanggungjawab atas segala yang berkaitan dengan daerah. Pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan penuh bagi pemerintah daerah dalam menciptakan daerah otonom yang bertanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan publik dengan menyesuaikan potensi dan kondisi yang dimiliki setiap daerah tersebut. Sejak diterapkannya sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undang, oleh karena itu Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengelolaan daerah dengan baik secara leluasa dan mandiri.

Pemerintah daerah memiliki sumber pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari dana perimbangan, pinjaman daerah, pendapatan asli daerah dan lain sebagainya pendapatan yang sah. Setelah adanya desentralisasi, daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Mamesah (1995) menyatakan bahwa kebijakan keuangan daerah dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sumber utama

daerah dalam memperkecil ketergantungan dana pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini dapat mewujudkan usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menciptakan usaha dengan perspektif yang luas sebagai jalan keluar untuk menambah kebutuhan dana serta dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan tertentu.

Kerangka penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan dapat dilihat pada sistem pengelolaan keuangan yang pada awalnya merupakan subsistem dari pemerintahan itu sendiri. Sistem keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 pada 23 menyatakan bahwa anggaran pendapatan serta belanja daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan yang lebih terbuka serta transparansi dalam pendistribusian, kewenangan, dan pembiayaan, serta penataan dalam sistem pengelolaan keuangan yang dapat memberikan perkembangan yang lebih baik serta terwujudnya kegiatan ekonomi secara optimal dan relevan sesuai dengan dinamika serta tuntutan masyarakat yang berkembang. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang Undang ini bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, namun yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka dari itu semangat desentralisasi, demokratis, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pada proses pengelolaan

keuangan daerah, sehingga dengan demikian sumber pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan dapat membergunakannya untuk membangun daerahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai sumberdaya alam yang melimpah termasuk sektor Pariwisata.

Perkembangan kepariwisataan secara global serta peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara secara tidak langsung telah berdampak kepada tuntutan penyediaan komponen industri pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai sumberdaya alam yang melimpah termasuk sektor Pariwisata. Perkembangan kepariwisataan secara global serta peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara secara tidak langsung telah berdampak kepada tuntutan penyediaan komponen industri pariwisata. Para pakar ekonomi telah memperkirakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan ekonomi pada abad ke-21. Apabila sektor pariwisata dikembangkan dengan baik secara berencana dan terpadu, maka peran sektor pariwisata dapat melebihi sektor migas (minyak bumi dan gas alam) dan industri lainnya. keberhasilan dalam mengembangkan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan pariwisata pun tidak luput dari adanya pengembangan obyek wisata/destinasi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara serta pendapatan perkapita. Salah satu provinsi yang dapat mengembangkan pariwisata ialah Provinsi Lampung dengan keberhasilan pemerintahnya dalam mengelola dan mengembang pariwisata sehingga menarik banyak wisatawan yang berkunjung di Lampung

Tabel 1. 1

KUNJUNGAN WISATAWAN LAMPUNG

No	Tahun	Wisatawan yang berkunjung
1	2016	7.536.827
2.	2017	11.641.199

Sumber : Diolah, 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa kenaikan wisatawan di Lampung, mengalami kenaikan yang cukup pesat, kenaikan wisatawan ini merupakan peran dari pemerintah daerah yang mempromosikan dan mengembangkan destinasi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung,

dalam rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) di Provinsi Lampung pada tahun 2013-2031, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tujuh kawasan wisata unggul (KWU) yaitu :

1. Kota Wisata di Bandar Lampung
2. Bahari Krui dan Tanjung Setia
3. Taman Nasioanl Way Kambas
4. Teluk Kiluan
5. Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi
6. Bakauheni dan Menara Siger
7. Taman Nasiona Bukit Barisan Selatan

Hal ini dapat dijadikan perbandingan peneliti dalam meneliti tentang pemerintah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima dalam mengembangkan pariwisata. fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah serta komitmen dan pemahaman akan pentingnya pengembangan sektor pariwisata dikalangan masyarakat dan pelaku pariwisata sudah mengalami peningkatan. Hal ini berarti terjadi peningkatan keyakinan investor untuk menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Lombok Barat. Mengatasi persoalan investasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengembangkan tiga fungsi yang melekat sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pengurusan perizinan investasi bidang usaha pariwisata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pada investor untuk melaksanakan kewajiban tersebut bersamaan dengan kegiatan pengembangan usaha. Peningkatan pemahaman masyarakat akan sektor pariwisata dilakukan empat pembinaan, mulai dari pembinaan SDM, pembinaan usaha, pembinaan sumber daya, hingga pembinaan lingkungan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kedalam maupun keluar. Kedalam dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat pemerintah yang terkait langsung dengan kepariwisataan. Keluar dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan pelaku wisata akan pentingnya pengembangan sektor pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata dalam masyarakat maupun mengikuti pameran-pameran berskala Nasional dan Internasional untuk mempromosikan pariwisata Lombok Barat. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah secara optimal serta ditunjang dengan pemahaman masyarakat dan pelaku pariwisata akan pentingnya pengembangan sektor pariwisata, dari tahun ke tahun meningkatkan investasi dibidang usaha pariwisata Kabupaten Lombok Barat, bahkan pada tahun 2005-2006 peningkatan investasi mencapai 8% pertahun. Lombok Barat memiliki wisata Pantai, Destinasi Alam, Industri dan Budaya dan Sejarah. Berikut ini adalah beberapa destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat:

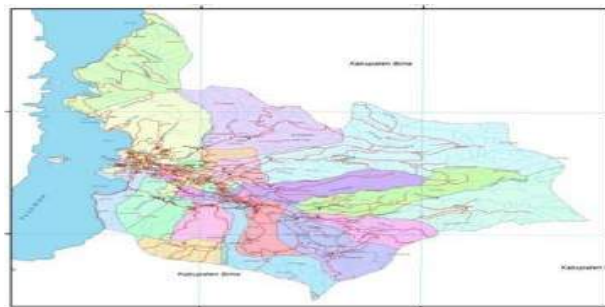
Tabel 1. 2
Destinasi Wisata Kabupaten Lombok Barat

Destinasi Pantai	Destinasi Alam	Destinasi Industri	Destinasi Budaya dan Sejarah
Pantai Gili Sudak	Pusuk Pas	Desa Sesela	Makam Batulayar
Pantai Gili Nangguk	Taman Lingsar	Desa Wisata Banyumulek	Pura Batu Bolong
Pantai Elak-Elak	Taman Narmada		Pelabuhan Lembar
Teluk Mekaki	Suranadi		
Pantai Bangko Bangko	Sesaot		
Pantai Senggigi	-		
Pantai Gili Tangkong	-		
Pantai Kedis	-		

Sumber : Dinas Pariwisata Lombok Barat, 2019

Menurut Dinas Pariwisata, wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat memiliki destinasi pantai, 5 destinasi alam, 2 destinasi industri, dan 3 destinasi budaya dan sejarah. Data ini di dapatkan dari Website Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Lombok Barat selalu mengoptimalkan destinasi wisata untuk menciptakan destinasi wisata internasional sesuai dengan Visi dari Pemerintah Daerah. Lombok Barat memiliki berbagai destinasi yang

cukup unik sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat. Fasilitas yang terdapat juga dari daerah wisata merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Beberapa tujuan utama yang menjadi prioritas pencapaian dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lombok barat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan citra kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Barat sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan kunjungan wisatawan Nusantara, melestarikan budaya daerah, lingkungan dan sumber daya pariwisata, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.



Gambar 1 1 Kota Bima, Provinsi NTB

Kota Bima pun dikenal dengan daerah yang memiliki keindahan pariwisata yang luarbiasa. Kota Bima berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan satu provinsi dengan Lombok Barat. Strategi pemerintahan antara dua daerah tersebut pasti memiliki perbedaan dalam mengelola pariwisatanya. Kota Bima tentu memiliki wisata yang tidak kalah bagus nya dengan Lombok Barat. Terbukti dengan pendapatan asli daerah Kota Bima pada tahun 2018 mencapai Rp. 35 Milyar dari seluruh sektor, sedangkan sektor pariwisata dapat mencapai Rp. 1,7 miliar hal ini dapat di dorong dengan data kunjungan wisatawan sebanyak 1.188.478, dengan wisatawan mancanegara sebanyak 1.152.022 orang dan wisatawan lokal sebanyak 36.456 orang. Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata Kota Bima sangat menjanjikan untuk dikelola serta dikembangkan dengan baik dalam rangka menciptakan perekonomian daerah. Tentu dalam meningkatkan sektor pariwisata harus mendapatkan dukungan dan peran, khususnya dari masyarakat setempat dan peran pemerintah daerah serta pelaku dalam sektor pariwisata, sehingga dapat menjadikan daerah tersebut menjadi daerah dengan tujuan wisata yang menarik. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila fasilitas sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung

harus dapat dipenuhi. Sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPDa) Kota Bima :

1. Merancang sebuah rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta berdaya saing yang sesuai dengan karakteristik fisik dan non fisik daerah, serta nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
2. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan serta memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata.
3. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembangunan potensi kebudayaan dan pariwisata yang meliputi daya tarik wisata usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata
4. Menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* pariwisata agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pembangunan kepariwisataan

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) pada tahun 2018-2023 Kota Bima, pada sektor pariwisata Kota Bima mendapatkan dukungan mengenai pengembangan wilayah pesisir dalam konsep Kota Tepian Air yang sekarang ini sedang diangkat sebagai isu yang strategis. Pembangunan terminal tipe A untuk AKAP, pembangunan sarana parkir, pembukaan dan perawatan jalan menjadi isu yang strategis dan menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Bima. Pengembangan sektor pariwisata tentu tidaklah mudah untuk dijalankan, karena sektor ini tidak pernah terlepas dari banyaknya kekurangan dan hambatan yang ada, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam mengembangkan pariwisata. Menurut Bappenas, luasnya wilayah Indonesia, biaya besar untuk sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia pada sektor pariwisata menjadi kendala penting bagi pengembangan pariwisata Indonesia. Hal yang sama dijelaskan oleh Singgalen dkk. (2018:175) bahwa permasalahan dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh manusia, alam dan pendanaan. Permasalahan tersebut dapat berupa kerusakan wisata alam yang dapat dilakukan oleh manusia serta kekurangan pendanaan dalam pengembangan pariwisata tersebut, sehingga dalam proses berjalannya pengembangan pariwisata akan terkendala oleh dana, kerusakan yang diperbuat oleh manusia sendiri, serta alam yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat wisata. Permasalahan yang dimiliki oleh Kota Bima ialah, Kota Bima memiliki masalah dalam pengembangan potensi pariwisata, Menurut Walikota Bima masalah yang ada di Bima antara lain fasilitas pendukung (air bersih dan listrik), dan pada aspek keamanan dan kenyamanan serta kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

Kota Bima ini adalah termaksud kota terkecil kedua setelah Kota Mataram dengan luas 222,25 Km² sebanyak 0,45% dari luasnya Provinsi Nusa Tenggara Barat serta topografi datarannya sebanyak 95% yang didominasi oleh kebun dan ladang sedangkan dalam kondisi tanah lebih banyak didominasi oleh gunung batu. Permasalahan yang dapat dijelaskan oleh penulis pada sektor pariwisata di Kota Bima ialah topografi tanah yang tidak rata pada sarana jalan, sarana umum seperti (tempat parkir, tempat istirahat, toilet umum serta tempat ibadah), kurangnya pusat cendaramata serta oleh-oleh di Kota Bima, tentu transportasi juga dapat menjadi kendala.

Tabel 1. 3
Destinasi Obyek Wisata Kota Bima

No	Potensi Pariwisata	Obyek Wisaya
1	Wisata Pantai	1. Pantai Lawata 2. Pantai Kolo 3. Pantai Ule 4. Pantai So Ati 5. Pantai Ni'u 6. Pulau Kambing 7. Pantai Amahami
2	Wisata Tirta	1. Diwu Monca 2. Lonco Gajah
3	Wisata Sejarah	1. Kompleks Pemakaman Tolobali 2. Wadu Ntanda Rahi 3. Lapangan Serasuba
4	Wisata Alam	1. Taman Ria 2. Taman Amahami 3. Taman Kota Bima

Sumber : Diolah, 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa ada 4 potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima yaitu Potensi Wisata pantai yang meliputi pantai Lawata, Kolo, Ule, So ati, Ni,u, dan lain sebagainya wisata pantai. Bukan hanya wisata pantai melainkan ada wisata Tirta, Sejarah maupun Wisata Alam. 4 potensi ini sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bima.

Penelitian ini di angkat karena ingin melihat dan mengidentifikasi bagaimana peran dari pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata sebagai aset penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Lombok Barat dan Kota Bima, adanya perbandingan antara dua daerah ini untuk melihat bagaimana suatu peran pemerintah dijalankan dalam mengelola pariwisata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana suatu daerah meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pariwisatanya, serta kebijakan yang dijalankan. Lombok Barat merupakan daerah yang kaya akan kekayaan alamnya dan begitupun dengan Kota Bima. Jadi antara dua daerah tersebut akan dibandingkan pengelolaan wisata dengan peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan peran dari pemerintah daerah tersebut, serta yang dipertanyakan kenapa Lombok Barat lebih terkenal wisatanya dibandingkan dengan Kota Bima yang tidak kalah bagusya dengan wisata yang ada di Lombok Barat, oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana peran dari pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam mengelola pariwisatanya.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas mendorong penulis untuk melakukan Penelitian yang berjudul **“Perbandingan Peran Pemerintah Daerah terhadap Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pemda Lombok Barat dan Pemda Kota Bima) Tahun”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam Pengembangan Pariwisata?
2. Apa saja kendala Pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam Pengembangan Pariwisata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Peran Pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam pengembangan pariwisata
2. Menganalisis kendala dan solusi untuk pengembangan pariwisata Lombok Barat dan Kota Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan intelektual tentang bagaimana peran sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Lombok Barat dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Praktif

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah dan referensi kepada Masyarakat tentang Faktor wisata dan pariwisata penting bagi peningkatan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah di Lombok Barat dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5 Telaah Pustaka

Dalam Tulisan ini peneliti mencari dan menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan Pariwisata dan Pendapatan Asli daerah yang dimana melalui jurnal, buku dan skripsi terdahulu yang nantinya menjadi tolak ukur dalam melakukan perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang di gunakan untuk mendapatkan teori ilmiah.

Zulmi Faisal (2018) meneliti mengenai Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh jumlah hotel terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh jumlah obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh jumlah wisatwan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantatif regresi dengan menggunakan metode data panel. Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Pengolahan data dilakukan menggunakan microsoft excel dan diolah menggunakan evIEWS9. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (variabel bebas) seperti jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah objek wisata, dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap variabel dependen (variabel terikat), peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi Lampung pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Peneliti menyimpulkan variabel Jumlah Hotel dan restaurant berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Artinya, ketika jumlah hotel meningkat maka akan terjadi peningkatan pendapatan asli Daerah di Provinsi Lampung. Namun hasil penelitian menunjukkan variabel Jumlah Objek wisata berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Dearah di Provinsi Lampung, artinya jumlah objek wisata bukan menjadi faktor utama atau tidak berpengaruh besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Artinya, ketika variabel jumlah kunjungan wisata meningkatkan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung

Rafliati Duwi Chafidhoh (2019) meneliti tentang Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pengembangan Objek Wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo di Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Blitar, Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Blitar. Dan juga untuk mengetahui tinjauan perspektif ekonomi syariah tentang upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Blitar. dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, dan diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Jenis penelitian kualitatif berkarakteristik alamiah atau apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi mengenai gambaran objek yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dari hasil analisis upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar. Peneliti menyimpulkan bahwa Dalam hal upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitarkhususnya Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo dengan membuat regulasi yaitu membuat perjanjian kerjasama dengan 3 pihak yaitu Perum Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Daerah disini Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki, membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata, pembinaan kepada masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata untuk lebih memahami kewajibannya dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata. Adapun cara untuk mempromosikan wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu melakukan promosi baik melalui media sosial seperti facebook, instagram, website dan aplikasi amazing blitar sebagai

pemandu wisata elektronik. Menyelenggarakan event kepariwisataan dan budaya untuk menarik wisatawan. Mengikuti pameran promosi pariwisata.

Pada pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Blitar di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu daya tarik dan ciri khas yang dimiliki dari kedua pantai. Sarana dan prasarana wisata terdapatnya loket penjualan tiket masuk, area parkir yang luas, toilet, masjid, warung-warung makan, tempat sampah, pos pantau keselamatan, rambu-rambu peringatan, jaringan internet untuk berkomunikasi sudah mudah. Adanya pengelolaan, perawatan, pelayanan obyek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo. Akomodasi yang tersedia di objek wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo berupa tempat untuk istirahat para wisatawan. hotel di sekitar lokasi belum ada yang ada hotel di sekitar pusat kota. Masyarakat yang ramah tamah, sikap keterbukaan masyarakat terhadap wisatawan. Faktor yang menghambat pengembangan sektor pariwisata di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo yaitu masalah sampah yang belum memiliki pengelolaan yang efektif. Perlengkapan penyelamatan. Kurangnya kesadaran pengunjung dan pelaku usaha wisata akan pentingnya sapta pesona pariwisata. Akses jalan yang kurang lebar, kurangnya fasilitas bermain anak misalnya ayunan, mainan pasir pantai. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif ekonomi islam belum ada tetapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan perilaku masyarakat seperti mewujudkan kemaslahatan umum tidak hanya untuk mencari keuntungan untuk pemerintah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, menjaga dan melestarikan alam. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah dilengkapi dengan air bersih serta alat sholat. Mudah untuk menemukan makanan yang halal . selain itu Pendapatan Asli Daerah dari wisata Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo itu berasal dari pajak dan bagi hasil dari perolehan tiket masuk setelah dikurangi pajak dan asuransi jiwa yang sudah sesuai dengan perjanjian. Meskipun dari pengembangan wisata segi fasilitas dan administrasi yang ada tidak memiliki standar yang digunakan untuk menuju wisata berbasis syariah tetapi sudah dapat dikatakan sesuai syariah karena memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan tetap memelihara toleransi serta nilai-nilai islam.

Jalaludin, Selamat (2019) meneliti tentang Dampak Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata serta dampak pengembangan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan Metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah ini adalah metode penulisan deskriptif kualitatif. Secara harfiah penulisan deskriptif Kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2002: 19). Dalam karya yang lain juga dinyatakan bahwa penulisan deskriptif Kualitatif adalah penulisan yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Riyanto, 2001: 23). Peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan pada hasil penulisan yang telah maka dapat ditarik simpulan bahwa Pengembangan Pariwisata Di Lombok Barat Sudah mulai semakin membaik dengan tersedianya berbagai macam fasilitas serta dampak pengembangan pariwisata yang dilihat dari peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat memperlihatkan adanya pergeseran mata pencaharian atau peningkatan lapangan pekerjaan penduduk lokal dari sektor pertanian ke sektor jasa, seperti jasa transportasi, dan pemandu wisata, berkembangnya sektor perdagangan dan industri rumah tangga seperti toko-toko, warung, kedai-kedai minuman, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan art shop akan tetapi pendapatan yang mereka dapatkan masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan karena mereka kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari luar yang memiliki modal, khususnya para pedagang lebih cenderung untuk menaikkan harga barang dagangan untuk meningkatkan pendapatan mereka tapi hal tersebut malah membuat wisatawan berbelanja diluar tempat wisata karena harga yang lebih murah, walaupun berbelanja ditempat wisata mereka lebih memilih toko-toko yang mewah karena lebih nyaman sehingga dengan demikian pendapatan masyarakat tidak dapat terus meningkat.

Fauzan, Fitriadi (2019) meneliti tentang Analisis Potensi Sektor Pariwisata di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode (NTB). Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sub sektor basis dan non basis terkait sektor pariwisata di Kota Bima menggunakan analisis *location quotient* (LQ), perkembangan sektor pariwisata di Kota Bima menggunakan analisis *shift share*, pertumbuhan ekonomi terkait sektor pariwisata di Kota Bima menggunakan analisis Tipologi Klassen, potensi sektor pariwisata di Kota Bima menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan trigulasi, analisis data bersifat induksi/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan nilai Location Quotient (LQ) yang menjadi sub sektor non basis dengan nilai $LQ < 1$ adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan air dan pengolahan; informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi. sebagai pendukung pariwisata di Kota Bima, lapangan usaha yang menjadi sub sektor pendukung antara lain penyediaan akomodasi dan makan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran serta pengadaan listrik dan gas. Sub sektor-sektor tersebut merupakan sub sektor basis dengan nilai $LQ > 1$. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor pariwisata di Kota Bima berdasarkan telaah location quotient berpotensi besar untuk dikembangkan karena didukung oleh lima sub sektor basis berdasarkan PDRB ADH konstan.

Penelitian terdahulu berisi tentang masalah yang sudah diteliti di awal, dalam hal ini saya sebagai peneliti ingin sekali melakukan penelitian mengenai “Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (*Studi kasus Pemda Lombok Barat dan Pemda Kota Bima*) Tahun 2019” judul ini mengarah kepada bagaimana pemerintah daerah memiliki peran dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri dalam sektor pariwisata tersebut, dalam penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, dikarenakan dalam penelitian membahas perbandingan antara dua daerah yaitu Pemerintah Lombok Barat dan Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisatanya, jadi dipenelitian ini lebih membandingkan bagaimana peran antar daerah tersebut dalam mengelola pendapat asli daerah.

1.6 Kerangka Teori

1.7.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata Yunani *autos* dan *Nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Daerah otonomi praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan dalam wacana administrasi publik disebut *local state government*. Menurut UU No.32 Tahun 2004 Otonomi daerah merupakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah:

- a. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.
- b. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
- c. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*.
- d. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

1.7.2 Peran Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa peran Pemerintah Daerah, diantaranya:

A. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

B. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannnya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

C. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Pada fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

1.7.3 Kemandirian Daerah

Secara konsepsional ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2004):

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

1.7.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Agar dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya. Menurut Madiasmo (2002:14), ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian : Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal.

2. Kemampuan keuangan daerah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonom daerah
3. Rasio Efektivitas Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang targetkan

1.7.5 Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan perjalanan agar menciptakan kebahagiaan, kesenangan, mencari pengalaman, merasakan kenikmatan alam serta mencari hal-hal baru dan lain sebagainya. Hal seperti bukanlah hal yang baru yang dilakukan oleh manusia masa sekarang ini melainkan sudah menjadi aktivitas yang perlu dalam menenangkan diri atau menghibur diri. Pengertian lain, secara etimologi kata pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu kata “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan kata “wisata” yang berarti perjalanan, berpergian. Menurut definisi yang luas, pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, yg bersifat sementara waktu yang dilakukan individu atau kelompok sebagai suatu usaha mencari kesenangan dengan lingkungan hidup dalam berbagai dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata dalam bahasa inggris adalah *tourism* yang diartikan sebagai perjalanan atau berpergian dalam mencari kebahagiaan untuk berkunjung diberbagai tempat wisata alam maupun sejarah yang dapat memberikan kepuasan diri.

Menurut dalam UU No 9 tahun 1990, mengenai pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut. pariwisata merupakan perjalanan yang dapat dilakukan untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat satu ketempat yang lainnya dengan maksud bukan sekedar untuk urusan bisnis atau mencari nafkah ditempat yang akan dikunjungi, melainkan hanya semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut, guna berekreasi dan untuk memenuhi keinginan yang selalu beraneka ragam. ada 3 alasan kenapa pariwisata sangat perlu untuk dikembangkan. Pertama, bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata terhadap suatu daerah wisata baik terhadap lokal maupun nasional harus dikelola dengan baik dan semestinya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, pariwisata itu tergantung bagaimana pemerintah menjaga dan mengembangkan seluruh destinasi lokal maupu nasional hal ini sangat erat juga kaitannya dengan mengembangkan perekonomian daerah dalam sektor pariwisata sehingga dapat menciptakan pendapatan bagi pemerintah daerah tersebut. oleh karena itu pembangunan wisata

akan sangat diperhitungkan untuk mendapatkan manfaat yang nantinya bakalan diterima oleh masyarakat umum.

Kedua, lebih banyak bersifat non ekonomis maksudnya, wisatawan akan Berkunjung ke suatu daerah wisata dalam hal ini salah satu dari motivasi seseorang dalam berkunjung ialah hanya untuk merasakan bagaimana keindahan alam, dan ingin merasakan bagaimana situasi jika berada di tempat yang bersejarah seperti candi, dan bangunan kuno lainnya. Banyak batasan pariwisata yang merinci motif-motif untuk mendorong seseorang dalam melakukan sebuah perjalanan. Terutama pada *International tourism* dengan berbagai motif-motif yang sangat beragam serta memiliki pengaruh yang dapat menentukan tujuan daerah wisata yang akan dikunjunginya. begitu banyak jenis wisata yang dapat ditentukan menurut motif tujuan perjalanannya, dapat juga dibedakan dalam beberapa jenis pariwisata khusus yaitu sebagai berikut :

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*).

Pariwisata ini dapat dilakukan untuk orang-orang dalam mencari suasana yang baru dan menikmati udara yang segar, serta ingin memenuhi rasa keingintahuannya terhadap sesuatu dan untuk meregangkan saraf-saraf tegang yaitu dengan cara merelaksasikan diri dalam melihat sesuatu yang baru, dan ingin menikmati keindahan alam yang luarbiasa dengan cara itu seseorang dapat merasakan ketenangan.

b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan waktu liburnya untuk istirahat, serta untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata ini dapat dilakukan oleh orang-orang untuk mempelajari suatu adat istiadat, tata cara, kelembagaan serta cara hidup pada tempat wisata yang dikunjunginya.

d. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*)

Jenis pariwisata ini terbagi menjadi dua, yaitu *Big Sport Event* (Pariwisata olahraga besar) dan *Sporting Tourism Of The Practitioners*.

e. Pariwisata dalam urusan dagang (*Business Tourism*)

jenis pariwisata ini ialah termaksud jenis pariwisata yang bukan dilakukan oleh pengusaha saja atau *industrialis* melainkan juga dapat mencakup semua kunjungan terhadap pameran, dan lain-lain.

f. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata jenis ini ialah pariwisata untuk berkonvensi dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti konferensi , simposium, dan sidang serta seminar internasional.

1.7.6 Objek Wisata

Objek wisata merupakan tempat yang menjadi tujuan para wisatawan untuk berkunjung, sehingga mempunyai daya tarik yang kuat untuk mengunjungi tempat wisata tersebut baik secara buatan manusia ataupun secara alamiah, antara lain pantai, situs sejarah, keindahan pegunungan serta alam, kebun binatang, dan lain sebagainya. Apabila banyaknya objek wisata dalam suatu daerah maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata baik melalui pajak daerah ataupun retribusi daerah, oleh karena itu pengelolaan objek wisata harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula bagi pemerintah daerah. Dalam objek wisata daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Setiap daerah harus memiliki apa yang disebut dengan *something to see* (sesuatu untuk dilihat). Artinya, objek wisata harus memiliki tempat yang dapat dilihat wisatanya dan dinikmati oleh pengunjung, tentunya berbeda dengan wisata yang lainnya maksudnya memiliki keunikan tersendiri.
- b. Setiap daerah harus menyediakan apa yang disebut dengan *something to do* (sesuatu untuk dikerjakan). Artinya, objek wisata ini harus menyediakan kegiatan yang tidak pernah mereka rasakan di tempat lainnya, sehingga para wisatawan dapat merasakan sesuatu yang berbeda yang mereka dapatkan saat mengunjungi obyek wisata tersebut.
- c. Setiap daerah harus menyediakan apa yang disebut dengan *something to buy* (sesuatu yang bisa dibeli). Artinya, suatu obyek wisatawan dapat menyediakan pusat perbelanjaan atau dapat membuka usaha sehingga para wisatawan dapat membeli suatu yang khas di daerah tersebut seperti adanya cendramata yang dapat dijadikan kenang-kenangan ataupun oleh-oleh. Tentunya yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lainnya.

1.7.7 Wisatawan

Wisatawan merupakan perseorangan atau sekelompok orang yang dapat melakukan perjalanan untuk mengunjungi beberapa tempat, dari tempat satu ke tempat lainnya dengan tujuan untuk berwisata di suatu tempat sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama, tetapi apabila mereka berkunjung dalam waktu 24 jam maka disebut dengan pelancong (excursionist). Biasanya wisatawan dalam melakukan perjalanan dari tempat kediamannya

jarang sekali menetap di tempat yang dikunjunginya dalam artian hanya menetap sementara saja tidak bakalan tinggal ditempat tersebut.

1.7.8 Peran Sektor Pariwisata

Peranan pariwisata ialah peranan ekonomi sebagai pemasukan serta pengembangan ekonomi dan juga sebagai sumber devisa negara, selanjutnya ada peranan sosial sebagai pencipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan berpeluang dalam menunjang usaha, terakhir peranan kebudayaan sebagai wadah dalam mempromosikan budaya-budaya yang ada disekitar daerah tersebut serta untuk melestarikan kebudayaan agar tidak ditinggal zaman , pariwisata, kesenian, dan lain sebagainya. Ketiga peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran ekonomi

Peran ekonomi dalam sektor pariwisata ini berguna untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui pariwisata, seperti yang diketahui bahwa pariwisata di Indonesia banyak sekali diminati oleh turis mancanegara ataupun masyarakat lokal sendiri, biasanya kegiatan perekonomian itu berlangsung pada saat wisatawan melakukan transaksi seperti membayar biaya transportasi, penginapan hotel, keperluan makan dan minum, membeli berbagai cendramata sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan serta biaya yang lainnya.

b. Peran Sosial

Peran sosial ini sangat berguna untuk meningkatkan PAD dalam mengembangkan jumlah hotel, restoran dan lain sebagainya, oleh karena itu usaha yang seperti ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat setempat.

c. Peran Kebudayaan

Peran kebudayaan ini menjadi suatu hal yang baik dalam memperkenalkan budaya antar daerah kepada masyarakat mancanegara atau lokal, seperti yang diketahui bahwa indonesia ini mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat melimpah seperti tari, adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan pelestarian budaya dan juga dapat mengembangkan pariwisata sebagai daya tarik untuk dapat berkunjung di obyek wisata yang dimiliki.

1.7.9 Pemerintah Daerah

Ni'matul Huda mengatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

1. Pemerintahan pusat
2. Pemerintahan daerah, yang dapat meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
3. Pemerintahan desa.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

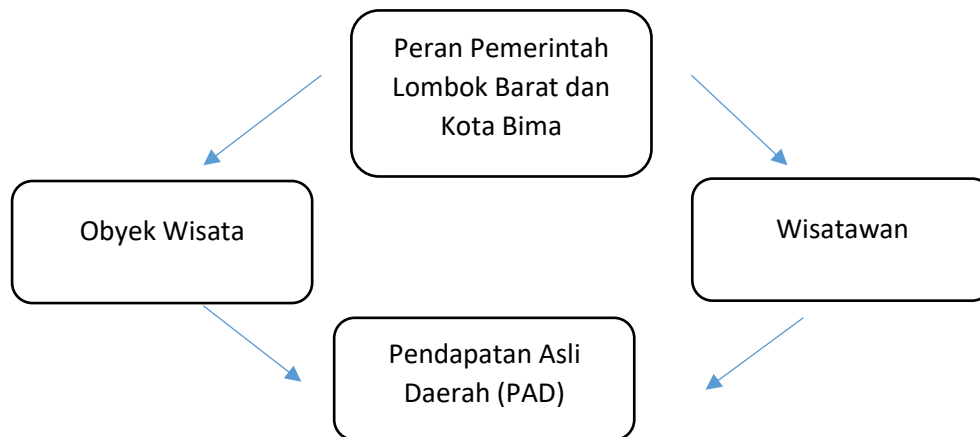
1.7.10 Pengembangan Organisasi

Pengembangan Organisasi Merupakan rangkaian penataan dan penyempurnaan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus guna memecahkan berbagai masalah yang timbul sebagai perubahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerapkan ilmu perilaku yang dilakukan oleh pejabat dalam organisasi sendiri atau dengan bantuan dari luar organisasi. (Sutarto:2000:27). Secara terminologi, organization development atau pengembangan organisasi mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan anggotanya efektif. Dengan kata lain, organization development merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia dalam sistem. Usaha sistematis tersebut memastikan kelangsungan dan pertumbuhan organisasi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja, dan kualitas hidup pekerja pada umumnya. Sondang P Siagian berpendapat bahwa pengembangan organisasi sebagai teori manajemen, berarti serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural.

1.7 Operasional Konsep

Variabel-Variabel yang digunakan dalam penelitian “Perbandingan Peran Pemerintah Daerah terhadap Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (*Studi Kasus Pemda Lombok Barat dan Pemda Kota Bima*) Tahun 2019” Dalam konsep ini bahwa melihat

bagaimana peran serta strategi Pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam meningkatkan pariwisata.



Gambar 1 2 Konsep

Konsep ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari ke 4 item tersebut yaitu Peran Pemerintah, Obyek Wisata, Wisatawan serta menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Lombok Barat dan Kota Bima. Seperti yang diketahui bahwa Lombok Barat dan Kota Bima merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alamnya dan menjadi salah satu pariwisata yang banyak diminati oleh turis mancanegara dan juga masyarakat lokal. Konsep ini menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima berpengaruh dalam pengelolaan obyek wisata, karena semakin banyaknya obyek wisata yang menarik maka akan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok barat dan Kota Bima, dari banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan banyak pula pendapatan pemerintah daerah melalui pengelolaan obyek wisata dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Lombok Barat dan Kota Bima.

1. 8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk kegunaan serta tujuan tertentu. Cara ilmiah maksudnya suatu kegiatan penelitian berdasarkan dengan ciri-ciri keilmuan seperti rasionalitas, empiris, dan sistematis. Rasionalitas adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh nalar dan pikiran manusia. Empiris adalah kegiatan penelitian yang dapat dilakukan dan diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain bisa mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis adalah suatu proses yang digunakan dalam penelitian dengan

menggunakan langkah - langkah tertentu yang bersifat logis. metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai Perbandingan Peran Pemerintah Daerah terhadap Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (*Studi Kasus Pemda Lombok Barat dan Pemda Kota Bima*) Tahun 2019”

2. Situs penelitian

Situs Penelitian adalah lokasi dimana data-data penelitian didapatkan, baik data primer maupun sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Lombok Barat dan Dinas Pariwisata Kota Bima, serta Website dari Dinas Pariwisata Lombok Barat dan Kota Bima dengan menggunakan Jurnal lainnya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini ialah pegawai dari Dinas Pariwisata di Lombok Barat dan Kota Bima yang dapat menjelaskan atau memberikan informasi mengenai Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor Pariwisata di Lombok Barat dan Kota Bima . Peneliti menggunakan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini menilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap

paling tahu tentang apa yang diteliti oleh peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.

4. Jenis Data

A. Tahap Observasi

Dalam hal ini dengan mengamati bagaimana keadaan lingkungan dinas yang akan diteliti dan juga dapat mengamati bagaimana pegawai kedinasan dapat membaaur kepada masyarakat sekaligus melihat pelayanan atau kinerja dari pegawai dinas yang akan diteliti oleh peneliti. Tahap ini merupakan tahapan yang fleksibel dapat dilihat dengan mudah dan dapat mengamati secara langsung keadaan dinas yang akan diteliti sesuai dengan pedoman pekerja pegawai yang dicantum dalam peraturan pemerintah Lombok Barat khususnya di kedinasan pariwisata.

B. Tahap Wawancara

Dalam wawancara peneliti terlebih dahulu membuat pedoman dalam merangkum isi pertanyaan di wawancara pada koresponden yang dimana disesuaikan dengan dimensi permasalahan terhadap apa yang diteliti. setelah itu pedoman wawancara ini dibuat dalam bentuk pertanyaan yang mendasar sehingga pertanyaan mendasar ini dapat dikembangkan dalam wawancara bersama koresponden. Sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada subjek/koresponden mengenai kesiapannya untuk dilakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara juga peneliti bisa menulis atau merekam apa yang di jelaskan oleh subjek (orang yang diwawancarai) saat itu, setelah itu hasil rekaman tadi, peneliti berhak untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan.

C. Tahap Dokumentasi

Tahap ini tidak kalah saing dengan tahapan-tahapan sebelumnya, yang dimana metode dokumentasi ini bertugas untuk mencari data baru berupa catatan kecil, jurnal, buku, surat kabar dan lain sebagainya sebagai acuan dalam pencaharian informasi mengenai penelitian mengenai pendapatan asli daerah pada kedinasan pariwisata. Dalam metode ini tidak begitu sulit dibandingkan dengan metode yang sudah dijelaskan diatas. Dalam hal ini juga penulis mengumpulkan data-data yang di publikasikan oleh Dinas Pariwisata di Lombok Barat dan Kota Bima sebagai acuan dalam pengambilan dana anggaran pendapatan atau pengeluaran dari pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan di Lombok Barat dan Kota Bima sekaligus dapat melihat bagaimana pendapatan asli daerah digunakan oleh dinas terkait melalui website dan juga data yang di publikasikan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Lombok Barat, yang dapat dibandingkan dengan perkembangan pariwisata pertahunnya menurut BPS

5. Sumber Data

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini bersumber pada wawancara dengan Pegawai atau kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat dan Kota Bima

B. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur, buku, dan dokumen. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku yang berkaitan dengan Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar, sedangkan tahap analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Raw Data

Merupakan data yang didapatkan selama penelitian. Raw data berisi fakta informasi. Raw data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian, catatan lapangan saat penelitian berlangsung.

b. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Tahap ini berisi persiapan data dengan cara mengolah data mentah dan memilah milah serta menyusun ke dalam jenis yang berbeda yang tergantung pada sumber informasi.

c. Membaca keseluruhan data

Tahap ini meliputi membaca semua data yang ada untuk memperoleh makna tersebut secara umum yang dapat merefleksikan makna secara keseluruhan.

d. Mencoding data

Tahap ini merupakan pemeriksaan teks hasil wawancara, kemudian mengelompokkan kalimat ke dalam kategori dan memberikan label terhadap kategori tersebut dengan menggunakan istilah yang berasal dari bahasa asli para

partisipan. Dalam penelitian ini coding dilakukan untuk menandai hasil wawancara yang berkaitan.

e. *Coding Deskripsi*

Melakukan *coding* untuk mendeskripsikan setting dan orang - orang dan kategori yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi dan peristiwa dalam penelitian ini.

1.9 Argumen Penelitian

Secara Konseptual bahwa obyek wisata dan wisatawan merupakan hal yang penting dalam pengembangan pariwisata di setiap daerah. Dalam hal ini peran pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima untuk mengembangkan pariwisata dapat dilihat dari pengelolaan obyek wisata di Lombok Barat dan Kota Bima, seperti yang diketahui bahwa dua daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan banyak obyek wisata unik, serta memiliki kebijakan dan peran yang berbeda antar daerah dalam mengembangkan pariwisata. Apabila obyek wisata dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka akan menarik banyak kunjungan wisatawan, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Lombok Barat dan Kota Bima .

Operasional ini disesuaikan dengan peran pemerintah Lombok Barat dan Kota Bima dalam mengembangkan pariwisata melalui obyek wisata yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Perbandingan ini dilakukan karena Lombok Barat dan Kota Bima sama-sama memiliki obyek wisata yang melimpah tetapi dalam pengembangannya berbeda. Seperti yang diketahui bahwa pariwisata Lombok Barat lebih dikenal dibandingkan dengan Kota Bima, sedangkan obyek yang dimiliki Kota Bima banyak. Oleh karena itu apa yang membedakan pengembangan pariwisata antara Lombok Barat dan Kota Bima